

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS MASYARAKAT

Oleh: Sri Hayati¹

PENDAHULUAN

Krisis lingkungan hidup sejak tiga dekade terakhir ini memasuki tahap yang sangat mengkhawatirkan. Data (Todaro, 1995:275-277) menunjukkan bahwa sekitar 29% lahan bumi mengalami penggurunan antara ringan, sedang, dan parah, sedangkan 6% lainnya diklasifikasikan mengalami penggurunan sangat parah. Hutan tropis yang mencakup 6% luas permukaan bumi namun memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi yaitu sekitar 50% dari jumlah spesies yang ada, antara 7,6 sampai dengan 10 juta hektar pertahun mengalami kemusnahan. Selain itu, pembakaran bahan bakar fosil melalui tingkat pertumbuhan industri memberikan kontribusi yang besar terhadap akumulasi CO₂ di atmosfer. Akibat dari akumulasi tersebut, suhu permukaan bumi naik rata-rata antara 1,5-4,5⁰ C yang memungkinkan peningkatan permukaan laut antara 25-140 centimeter sebagai konsekuensi dari pencairan es di daerah kutub. Penggunaan energi nuklir sebagai alternatif dari energi fosil memberi dampak terhadap kebocoran reaktor nuklir seperti yang terjadi di Chernobyl pada tanggal 26 April 1986, selain sampah radioaktif.

Salah satu upaya dilakukan oleh PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) dimulai dengan terselenggaranya konperensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm tahun 1972. Konperensi ini menghasilkan deklarasi

tentang lingkungan hidup manusia yang dikenal dengan nama deklarasi *Stockholm*. Selanjutnya, tahun 1983 terbentuk Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development, WCED*) dengan tujuan penyebarluasan pemahaman tentang perlunya wawasan lingkungan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Puncak dari komitmen tentang kesadaran lingkungan hidup adalah hasil konperensi WCED pada tahun 1992 yang menghasilkan lima dokumen tentang lingkungan dan pembangunan.

Namun demikian, komitmen politik tersebut belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh negara-negara yang bersangkutan. Berbagai kendala menghambat konsistensi pelaksanaan kesepakatan di atas, antara lain masih rendahnya kesadaran tentang pengelolaan lingkungan hidup di samping kebutuhan ekonomi yang mendesak sehingga mengabaikan faktor-faktor lingkungan.

Atas dasar pemikiran tersebut, makalah ini yang berorientasi pada kajian perlakuan pengelolaan lingkungan yang difokuskan pada masyarakat amatlah strategis untuk dilakukan guna tercipta kesinambungan daya dukung lingkungan hidup.

Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Masyarakat

Kegiatan yang mendukung kreativitas masyarakat untuk memelihara lingkungan sendiri hendaknya dilakukan sebagai pendukung dari pengembangan program yang dilaksanakan. Hal ini diperlukan karena kegiatan ini menyangkut jaminan akses ke sumber daya, hak untuk berperan

¹ Dr. Sri Hayati, M.Pd. merupakan staf pengajar pada jurusan Geografi-Kepala Pusat Penelitian Kependudukan dan Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian – Universitas Pendidikan Indonesia (d/h IKIP Bandung).

serta dalam pengambilan keputusan, dan hal atas pendidikan dan pelatihan yang memungkinkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka secara berkelanjutan di samping memelihara kelestarian lingkungan. Terdapat enam kegiatan dalam kaitannya dengan mendukung kreativitas masyarakat dalam memelihara lingkungan sendiri, seperti berikut (IUCN-UNEP-WWF, 1991:68-75).

Pertama, menyediakan akses yang terjamin ke sumber-sumber daya bagi kelompok dan perorangan serta pembagian yang adil dalam pengelolaannya. Untuk itu diperlukan hak yang sah atas kegiatan yang mereka lakukan, seperti misalnya petani memiliki hak atas lahan yang digarapnya dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga mereka dapat mengelola sumber daya lahan tersebut dalam jangka waktu yang lama. Sumber daya yang dipakai bersama perlu dikelola berdasarkan kesepakatan di antara semua pihak yang berkepentingan. Masyarakat setempat yang bergantung pada sumber daya lebih berkepentingan dengan tata pengelolaan yang diterapkan dibandingkan pihak luar yang tidak terkait langsung.

Kedua, meningkatkan pertukaran informasi, keahlian, dan teknologi. Informasi diperlukan masyarakat untuk mengembangkan wawasan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya yang mereka miliki. Dalam hal ini masyarakat sebagai penerima informasi perlu dilibatkan, baik dalam penyusunan dan penelaahan data tentang lingkungan setempat. Teknologi yang berwawasan lingkungan, dalam pengembangannya akan lebih baik jika melibatkan masyarakat setempat agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat, serta memperhatikan peran gender sehingga efisien, efektif, bermanfaat, dan perawatannya dapat dilakukan sendiri.

Ketiga, meningkatkan partisipasi dalam konservasi dan pembangunan. Pemerintah setempat, masyarakat, kalangan dunia usaha, dan kelompok-

kelompok lain yang berkepentingan harus membantu menyusun rencana pembangunan yang akan dijalankan. Mereka menjadi mitra dalam penentuan kebijaksanaan, program, dan proyek yang berkaitan dengan mereka itu sendiri. Partisipasi penuh mutlak diperlukan. Pemerintah harus menjamin bahwa semua kelompok dapat mengekspresikan dan mempertahankan kepentingan masing-masing. Semua anggota masyarakat perlu berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka, seperti keputusan tentang tata guna serta pengelolaan sumber daya bersama.

Keempat, mengembangkan pemerintah daerah yang efektif. Pemerintah daerah merupakan satuan-satuan kunci dalam pemeliharaan lingkungan yang bertanggung jawab atas perencanaan tata guna lahan, pengendalian pembangunan, penyediaan air, pengolahan limbah, pelayanan kesehatan, pengangkutan umum, dan pendidikan. Dalam hal ini pemerintah daerah harus mampu untuk: (1) tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan warga dalam hal infrastruktur dan pelayanan dan jaminan penyelenggaraan sistem hukum serta peraturan yang akan melindungi warga dari pihak lain, (2) mengusahakan pelaksanaan rencana tata guna lahan dan undang-undang anti pencemaran sesuai dengan standar nasional atau yang lebih tinggi, (3) menjamin penyediaan air yang aman dan efisien, pengolahan limbah yang dilengkapi saluran sanitasi, dan pembuangan limbah, (4) mengatur sistem pengangkutan dan industri lokal yang sesuai dengan standar, (5) memperkuat kegiatan-kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, dan (6) menanamkan dan mempromosikan perbaikan lingkungan wilayah administratifnya.

Kelima, pemeliharaan lingkungan oleh masyarakat. Pemeliharaan lingkungan oleh masyarakat dilaksanakan atas dasar strategi yang dikembangkan dalam bentuk tindakan nyata. Masyarakat seyogyanya

dilibatkan dalam semua tahapan kegiatan lingkungan, mulai dari penyusunan sasaran kegiatan sampai kepada pelaksanaan serta evaluasi keberhasilan kegiatan. Pendekatan dengan cara ini ditujukan agar semua masukan dari berbagai pihak, termasuk di dalamnya tata nilai, dapat dipertimbangkan secara adil dalam segala keputusan.

Keenam, menyediakan dukungan keuangan dan teknik untuk kegiatan-kegiatan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat. Penyediaan dana dapat dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat, perusahaan yang berada di lingkungan tempat tinggal, organisasi non-pemerintah, dan lembaga pelestarian lingkungan hidup. Perangkat ekonomi dan peraturan seperti konsesi pajak, subsidi, dan jasa produksi dapat merangsang perbaikan lingkungan. Harga produk yang dibuat dari, atau menggunakan, sumber daya alam, harus mencerminkan nilai sumber daya bersangkutan sepenuhnya, dan memberikan imbalan yang wajar kepada masyarakat. Insentif ekonomi dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan dan menjamin bahwa mereka memperoleh imbalan yang layak.

PENUTUP

Penyebarluasan model pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada masyarakat dikembangkan agar masyarakat secara mandiri dapat mengelola lingkungan hidup, sehingga sumberdaya yang ada dapat terjaga kesinambungannya. Tahapan pengembangan model pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni: *pertama*, informasi kebutuhan masyarakat akan pengelolaan lingkungan hidup yang akan digunakan sebagai landasan dalam pengembangan model. *Kedua*, dilakukan pengembangan model pengelolaan lingkungan hidup berlandaskan informasi

kebutuhan yang dihasilkan pada tahap pertama. *Terakhir*, merupakan pelaksanaan penerapan model yang telah dikembangkan yang merupakan usaha terpadu pelaku lingkungan hidup yaitu masyarakat itu sendiri, pengusaha, pemerintah dan lembaga non-pemerintah yang terkait.

Pengelolaan lingkungan yang berbasis pada masyarakat akan menciptakan suatu sistem masyarakat yang secara mandiri dapat memanfaatkan sumberdaya alam tanpa mengabaikan kepentingan kesinambungan sumberdaya alam itu sendiri. Dengan demikian, kemandirian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat membentuk suatu pola interaksi antara masyarakat dengan lingkungan hidupnya secara simbiosis mutualistis dalam jangka yang panjang. Semoga!!

PUSTAKA ACUAN

- Baharudin, Azizan. (1985). *Science, Values and The Environment: On The Need for A Coherent and Holistic Worldview*. Dalam Azizan HJ Baharuddin (Ed.) *Environment and Development: Ethical and Educational Considerations*. Kualalumpur: Institut Kajian Dasar.
- Blaikie, N.W.H. (1993). "Education and Environmentalism: Ecological World View and Environmentally Responsible Behaviour". *Australian Journal of Environmental Education* 9. Supplement August.. p. 14.
- Chiras, Daniel D.(1991). *Environmental Science: Action for a Sustainable Future*. California: The Benjamin/Cummings Pub. Co. Inc.
- Hungerford, H.R. & Volk, Trudi L. (1990). "Changing Learner Behaviour Through Environmental Education". *The Journal of Environmental Education Vol. 21*. P.3.

- Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. (1996). *Agenda 21 Indonesia: Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Kantor Meneg LH.
- Mark Orams. (1994). "Creative Effective Interpretation for Managing Interaction Between Tourist and Wildlife". *Australian Journal of Environmental Education* 10. Pp 21-34.
- Meadow, Dennis L. et.al.(1972). *The Limits to Growth*. N.Y.: The American Library.
- Ridener, Larry. (1995). "Worldview: An Experimental Analysis of Environmental Attitude Change". *Paper presented at Southwestern Social Science Association, Environmental Sociology Session, Annual Meeting, Dallas, TX*. Available: <http://diogenes.edu/WWWprovider/LarryRidener/ENVEDU.HTM>.
- Van Rensburg, Eureka Janse. (1994). "Social Transformation in Response to the Environment Crisis: The Role of Education and Research". *Australian Journal of Environmental Education* Vol 10. P.1-20.
- World Commission on Environment and Development. *Hari Depan Kita Bersama*. (1995). Terjemahan dari *Our Common Future*. Jakarta: PT. Gramedia.